

BAB IV

KESIMPULAN

Pada saat PRRI diumumkan di kota Padang, sebahagian masyarakat kota telah pergi meninggalkan kota, termasuk Walikota dan kepala-kepala dinas kota Padang. Sehingga kota Padang sepi, segala aktifitas terhenti, begitu juga dengan lembaga pemerintahan, sehingga terjadi kekosongan kursi pemerintahan Sumatera Barat dan kota Padang. Situasi tersebut tidak berlangsung lama, setelah APRI berhasil merebut kota Padang, pemerintah pusat berupaya menormalisasi kembali keadaan kota. Dalam proses menormalisasi kembali kota Padang, pemerintah juga berupaya menyusun kembali kursi pemerintahan. Pada awal pergolakan, masyarakat kota Padang merasakan kekhawatiran dan ketakutan, hal ini disebabkan karena kegiatan tentara APRI yang membuat masyarakat tidak bisa leluasa melaksanakan kegiatan, sehingga kondisi sosial masyarakat kota terganggu, begitu juga dengan perekonomian masyarakatnya. Sehubungan dengan banyaknya wargakota yang mengungsi keluar daerah, sehingga pasar-pasar dikota Padang menjadi lengang oleh pengunjung, hal ini berakibatkan terjadinya kemunduran ekonomi dalam masyarakat, kondisi tersebut berlangsung sampai akhir tahun 1958.

Adapun demikian pemerintah berhasil menormalisasi kembali kota, terutama di bidang pemerintahan, walaupun belum sepenuhnya kembali seperti sediakala, akan tetapi situasi dan kondisi kota Padang berhasil dipulihkan. Akan tetapi kondisi kota Padang yang begitu mengkhawatirkan hanya di tahun pertama

pergolakan tersebut, karena memang pada tahun tersebut, gejatan senjata antara APRI dan PRRI masih berkecamuk, namun pada awal tahun 1959, keadaan kondisi di kota Padang sudah kembali stabil. Masyarakatnya sudah mulai melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Di tahun 1959 kota Padang sudah lumayan ramai, para pengungsi yang lari keluar kota satu persatu sudah kembali ke kota, bahkan ada juga masyarakat daerah yang berdatangan ke kota dengan tujuan mencari kehidupan. Hal ini dikarenakan kehidupan di daerah-daerah mulai tidak aman, karena pergolakan tersebut melakukan perang gerilya di hutan-hutan sehingga keamanan di daerah terganggu, hal tersebut menghambat masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, hal tersebut mempengaruhi tatanan kehidupan dalam masyarakat daerah, khususnya perekonomian masyarakat. hingga akhirnya pemerintah pusat memberikan bantuan berupa bantuan sembako kepada masyarakat. Di awal tahun 1960 kekalahan daerah begitu terlihat, dan akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan keputusan agar semua masyarakat yang terlibat dalam pergolakan agar menyerahkan diri, dengan demikian setelah sepenuhnya masyarakat kembali dan kemudian daerah resmi meraih kekalahan, kekalahan tersebut memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat daerah khususnya Minangkabau, dampak tersebut diantaranya, hilangnya harga diri sebagai orang Minangkabau, masyarakat mengalami trauma tersendiri, contohnya, dalam pemberian data tentang PRRI, Beberapa masyarakat kota Padang itu sendiri, awalnya tidak mau menyebutkan identitas dirinya karena takut nantinya disalahgunakan, apalagi yang berkaitan dengan PRRI, trauma tersebut masih dirasakan oleh sebahagian kecil masyarakat kota Padang itu sendiri.

